



Pendekatan Rehabilitasi Kepribadian Pada Narapidana Dalam Fase Pra-Resosialisasi Di Lapas Kelas IIB Way Kanan

Ihsan Suhargo¹, Slamet Haryadi²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ihsansuhargo@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 12 Desember 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of personality rehabilitation programs for drug-involved inmates during the pre-reintegration phase at Class IIB Way Kanan Correctional Facility. Employing a qualitative method with an empirical legal and socio-legal approach, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings reveal that the rehabilitation program comprises three main components: religious development, psychosocial counseling, and vocational training. Despite structured implementation, several barriers were identified, including limited human resources, insufficient facilities, low inmate motivation, and lack of integration between program components. Nevertheless, the institution has shown adaptive policy responses through capacity building, integrated scheduling, external partnerships, and data-based evaluation tools. Integrated personality rehabilitation emerges as a critical strategy to foster inmates' psychological resilience and promote social reintegration post-release. The study recommends strengthening holistic, intersectoral rehabilitation approaches to support a more transformative correctional system.

Keywords: *personality rehabilitation, drug offenders, pre-reintegration, correctional system, Way Kanan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi kepribadian bagi narapidana narkoba dalam tahap pra-resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi terdiri dari tiga komponen utama: pembinaan keagamaan, konseling psikososial, dan pelatihan keterampilan. Meskipun pelaksanaan program telah berjalan sistematis, berbagai faktor penghambat ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, motivasi internal narapidana, serta belum optimalnya integrasi antarkomponen pembinaan. Namun demikian, kebijakan Lapas Way Kanan menunjukkan respons adaptif dengan melakukan penguatan kapasitas petugas, penjadwalan terpadu, kerja sama eksternal, dan penyusunan instrumen evaluasi berbasis data. Rehabilitasi kepribadian yang terintegrasi menjadi strategi penting dalam membentuk ketahanan psikologis narapidana dan mendorong reintegrasi sosial pasca-pembebasan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk penguatan program berbasis pendekatan holistik dan kemitraan lintas sektor guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih transformatif.

Kata Kunci: rehabilitasi kepribadian, narapidana narkoba, pra-resosialisasi, pemsyarakatan, Way Kanan

PENDAHULUAN

Rehabilitasi narapidana merupakan aspek sentral dalam sistem pemsyarakatan modern yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama, bukan sekadar pelaksanaan hukuman. Dalam konteks ini, pembinaan kepribadian menjadi komponen kritis dalam menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan dan bermakna. Hal ini sejalan dengan transformasi paradigma pemsyarakatan dari model punitif menuju pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi, berorientasi pada hak asasi manusia dan pemberdayaan sosial (Putro et al., 2025).

Di Indonesia, lembaga pemsyarakatan dihadapkan pada tantangan kompleks dalam merealisasikan fungsi rehabilitasi, terutama pada tahap pra-resosialisasi. Tahap ini merupakan momen krusial menjelang pembebasan narapidana, di mana program pembinaan harus mencapai titik maksimal dalam aspek psikososial, spiritual, dan keterampilan hidup. Namun dalam praktiknya, banyak lapas masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur, overload kapasitas hunian, hingga keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang psikologi pemsyarakatan (Thahir et al., 2023).

Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Way Kanan menjadi contoh konkret dari realitas tersebut. Meskipun telah menjalankan sejumlah program pembinaan seperti pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, dan konseling psikososial, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam merespons kebutuhan individu narapidana yang kompleks. Berbagai studi menunjukkan bahwa latar belakang trauma, gangguan kecemasan, serta ketidakmampuan adaptasi sosial pasca-penahanan menjadi faktor signifikan yang memengaruhi keberhasilan reintegrasi (Affandi et al., 2025b). Ini menunjukkan perlunya integrasi pendekatan *trauma-informed care* dalam program pembinaan, terutama pada fase pra-resosialisasi yang seharusnya menjadi masa transisi yang penuh dukungan.

Kondisi psikososial narapidana yang beragam turut memengaruhi dinamika pembinaan kepribadian. Dalam beberapa kasus, individu mengalami distress mendalam akibat pengalaman traumatis sebelum atau selama masa penahanan. Trauma yang tidak tertangani berpotensi menghambat perkembangan karakter, mengganggu stabilitas emosi, serta meningkatkan risiko residivisme (Rahmawati et al., 2024). Oleh karena itu, rehabilitasi kepribadian tidak dapat dipandang sebagai intervensi satu dimensi, melainkan harus menggabungkan aspek psikologis, hukum, sosial, dan budaya secara terpadu.

Selain dimensi psikologis, tantangan dalam aspek legal dan kebijakan juga menjadi hambatan struktural. Walaupun Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 telah mengamanatkan pemenuhan hak pembinaan narapidana secara manusiawi, pelaksanaannya masih sering mengalami deviasi di lapangan. Salah satu persoalan mendasar adalah kesenjangan antara regulasi dan praktik, terutama dalam pelaksanaan program pra-resosialisasi yang sering kali tidak didukung dengan

anggaran, fasilitas, dan pelatihan sumber daya manusia yang memadai (Putro et al., 2025).

Studi-studi terkini juga menekankan pentingnya memperhatikan pengalaman subjektif narapidana selama menjalani program pembinaan. Narasi mereka mengungkap adanya ketidakpuasan terhadap model pembinaan yang bersifat monoton, tidak partisipatif, serta kurang adaptif terhadap kebutuhan psikologis individu (Rinaldi et al., 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan kurikulum pembinaan yang bersifat fleksibel, berbasis kebutuhan (needs-based), serta mempertimbangkan prinsip-prinsip rehabilitasi yang berkeadilan restoratif.

Keberhasilan program rehabilitasi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana. Stigma sosial dan stereotip negatif yang masih kuat dapat menimbulkan hambatan serius dalam proses reintegrasi sosial. Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan perlu memperkuat program penyadaran publik dan jejaring dengan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif (Narawati et al., 2025). Tanpa dukungan eksternal yang memadai, bahkan program pembinaan yang ideal sekalipun akan kesulitan menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

Di sisi lain, studi oleh Cahyaningtyas et al. (2021) menggarisbawahi bahwa keberhasilan rehabilitasi sangat erat kaitannya dengan adanya hubungan interpersonal yang positif antara petugas pemasyarakatan dan warga binaan. Interaksi berbasis empati, kepercayaan, dan pengakuan nilai kemanusiaan dinilai lebih efektif dalam mendorong transformasi pribadi dibandingkan pendekatan yang bersifat koersif.

Secara keseluruhan, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi kepribadian pada tahap pra-resosialisasi, termasuk di dalamnya aspek desain program, metode pelaksanaan, keterlibatan narapidana, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan. Evaluasi ini bukan hanya penting untuk memastikan bahwa program sejalan dengan kebijakan nasional, tetapi juga untuk menghasilkan model pembinaan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan narapidana di Lapas Kelas IIB Way Kanan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang yang ada, reformasi pemasyarakatan di Indonesia dapat diarahkan secara lebih strategis menuju pemenuhan hak asasi narapidana, penguatan reintegrasi sosial, serta pencegahan residivisme secara sistematis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan fokus pada fenomena sosial-hukum yang berlangsung dalam konteks rehabilitasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dengan lebih komprehensif bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata, khususnya pada tahap pra-resosialisasi narapidana. Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang hidup dan dinamis, memengaruhi serta dipengaruhi oleh praktik sosial (Widyawati et al., 2025). Oleh karena itu, metodologi ini

menggabungkan pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan kajian dokumen resmi sebagai sumber utama data.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap dan memahami fenomena hukum dalam konteks sosial yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, peneliti tidak hanya tertarik pada apa yang tertulis dalam regulasi formal, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterjemahkan dalam bentuk tindakan, prosedur, dan kebijakan di lapangan, khususnya di Lapas Kelas IIB Way Kanan. Fokusnya adalah mengevaluasi efektivitas dan tantangan pelaksanaan program rehabilitasi kepribadian narapidana dalam fase kritis menjelang pembebasan.

Dalam kerangka teori, pendekatan ini mendasarkan diri pada sosiologi hukum dan teori fungsional struktural, yang menempatkan hukum sebagai mekanisme pengendali sosial dan sarana rekayasa sosial (Dwiyanti & A, 2025). Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum memberikan kerangka untuk menilai apakah instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 benar-benar mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan restoratif dan pemasyarakatan yang manusiawi dalam praktik rehabilitasi.

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih secara purposif karena dianggap representatif dalam melaksanakan program rehabilitasi yang mencerminkan fase transisi dari pidana ke reintegrasi sosial. Lapas ini memiliki karakteristik sebagai lembaga dengan keamanan menengah yang menjalankan beragam program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Selain itu, keterbukaan lembaga terhadap praktik-praktik progresif seperti konseling psikososial, pelatihan spiritual, serta program keahlian teknis memberikan peluang eksplorasi lapangan yang lebih luas (Affandi et al., 2025a).

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif. Pertama, studi kepustakaan digunakan untuk menelaah regulasi pemasyarakatan terbaru, jurnal ilmiah, buku teks, dan dokumen hukum lain yang relevan. Tujuannya adalah membangun kerangka teoretis dan konseptual mengenai konsep pembinaan kepribadian dalam pemasyarakatan. Kedua, studi lapangan dilaksanakan melalui observasi non-partisipatif terhadap kegiatan pembinaan yang berlangsung di lapas. Observasi ini bertujuan untuk menangkap dinamika perilaku, interaksi sosial, serta sistem kerja antara petugas dan warga binaan. Ketiga, wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap sejumlah narasumber, mulai dari pejabat struktural seperti Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, hingga para pembimbing pemasyarakatan dan narapidana yang menjadi partisipan dalam program pra-resosialisasi.

Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti menggali lebih dalam persepsi, pengalaman, dan penilaian subyektif responden tanpa membatasi kebebasan narasi mereka. Proses ini juga membuka ruang bagi eksplorasi hal-hal tak terduga yang mungkin tidak tertangkap dalam instrumen tertulis. Di samping itu, dokumentasi juga digunakan sebagai teknik pendukung untuk memperoleh arsip-arsip resmi terkait program pembinaan, seperti jadwal kegiatan, laporan monitoring, dan materi pelatihan (Garza - Reyes et al., 2018).

Pendekatan kombinatorik ini diyakini mampu meningkatkan validitas data dan memperkuat analisis secara triangulatif.

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis kualitatif yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga proses utama: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan penyajian data diwujudkan dalam bentuk narasi tematik (Muñoz-Pascual et al., 2019). Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif, dengan menghubungkan data empiris dengan kerangka teoritis yang telah disusun sebelumnya.

Penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip etika penelitian sosial. Seluruh partisipan diberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, serta diberi kesempatan untuk menyatakan persetujuan partisipasi secara sukarela. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dijaga kerahasiaannya untuk menghindari risiko stigmatisasi atau dampak negatif lainnya (Nurhalim & Wijaya, 2021).

Secara keseluruhan, desain metodologi dalam penelitian ini dirancang untuk menangkap realitas kompleks pelaksanaan program rehabilitasi kepribadian di lapas, dengan mempertimbangkan dimensi hukum, psikologis, dan sosial. Harapannya, hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan masyarakat yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga binaan dan mendukung upaya reintegrasi yang berkelanjutan (Rinaldi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Program Rehabilitasi Kepribadian bagi Narapidana Narkotika dalam Tahap Pra-Resosialisasi

Pra-resosialisasi merupakan fase kritis dalam sistem masyarakat modern yang tidak hanya bertujuan membatasi kebebasan, tetapi menjadi titik balik dalam rekonstruksi moral dan sosial individu narapidana narkotika. Di Lapas Kelas IIB Way Kanan, upaya pembinaan kepribadian telah dikembangkan menjadi suatu sistem rehabilitasi berlapis yang terdiri dari pembinaan keagamaan, konseling psikososial, dan pelatihan keterampilan kerja.

Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan di Lapas Kelas IIB Way Kanan memiliki peran krusial dalam menyentuh dimensi spiritual narapidana narkotika. Pendekatan ini telah terbukti memperkuat internalisasi nilai moral dan memberikan rasa makna baru terhadap kehidupan mereka. Aktivitas yang meliputi pengajian, ceramah keagamaan, dan pelatihan ibadah dirancang bukan semata ritual, tetapi sebagai terapi spiritual yang membangun rasa tanggung jawab personal dan sosial (Hasanah, 2022).

Dalam sistem ini, pembinaan agama dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan penyuluh dari Kementerian Agama dan lembaga dakwah, serta narapidana yang telah menunjukkan kemajuan spiritual sebagai peer mentor. Kegiatan-kegiatan ini menekankan pada kesadaran transendental sebagai pelindung

dari kemungkinan kekambuhan. Secara psikologis, kegiatan ibadah berkelompok juga meningkatkan kedisiplinan dan solidaritas sosial, yang menjadi modal penting dalam proses reintegrasi.

Program Konseling Psikososial

Konseling psikososial menjadi tulang punggung intervensi rehabilitatif yang menangani beban emosional dan trauma pada narapidana narkoba. Program ini tidak hanya menysasar aspek perilaku, tetapi menekankan rekonstruksi kognisi dan penyembuhan luka psikologis akibat penyalahgunaan zat. Dengan metode yang menggabungkan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), konseling ini mampu mengubah cara pikir destruktif menjadi lebih adaptif dan konstruktif (Arifin, 2020).

Sesi dilakukan secara individual maupun kelompok. Pada level individual, konselor fokus pada pemulihan trauma personal dan peningkatan harga diri. Dalam kelompok, proses dinamika sosial menjadi medium untuk membangun empati, dukungan, dan rasa memiliki. Adanya sesi reflektif dan storytelling juga membantu narapidana melihat kembali perjalanan hidupnya sebagai bahan evaluasi dan penyusunan masa depan.

Dampak dari program ini dapat dilihat dari kasus A, narapidana usia 32 tahun yang mengalami trauma berat akibat kehilangan keluarga. Setelah mengikuti konseling selama empat bulan, ia mulai menunjukkan perubahan signifikan: membuka diri, mengikuti pelatihan keterampilan, dan menunjukkan aspirasi menjadi konselor pasca-bebas. Ini memperlihatkan bahwa konseling tidak hanya bersifat terapeutik, tetapi juga transformatif.

Pelatihan Keterampilan

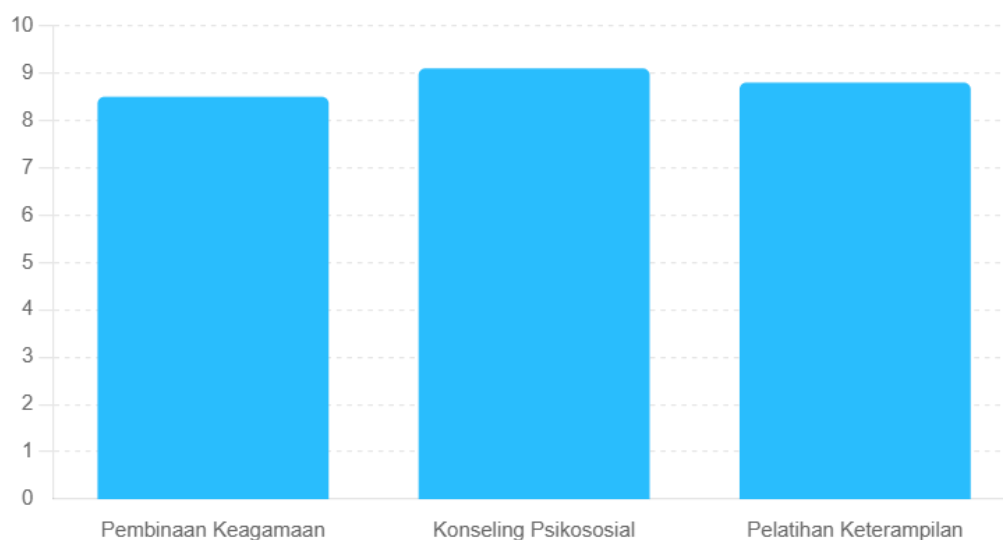
Pelatihan keterampilan di Lapas Way Kanan tidak sekadar pelatihan kerja, tetapi sebagai mekanisme penguatan identitas produktif. Narapidana yang sebelumnya merasa tidak berguna atau dipinggirkan secara ekonomi, menemukan kembali makna hidup melalui kegiatan produktif seperti menjahit, pengelasan, budidaya pertanian, dan produksi makanan ringan (Wardhana et al., 2025).

Model *learning by doing* yang diterapkan memungkinkan narapidana belajar secara praktikal dengan bimbingan instruktur internal maupun eksternal. Pelatihan ini juga dirancang kontekstual dengan kebutuhan lokal agar dapat langsung diterapkan pasca-pembebasan. Bahkan beberapa narapidana telah berhasil membuat rencana bisnis mikro berbasis keahlian yang diperoleh selama pelatihan.

Selain nilai ekonomis, pelatihan ini juga meningkatkan psikologis narapidana. Mereka merasa dihargai, mampu, dan termotivasi untuk tidak kembali pada perilaku destruktif. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa keterampilan kerja bukan hanya untuk kemandirian finansial, tetapi juga sebagai media pemulihan martabat diri.

Efektivitas Program Pra-Resosialisasi

Berikut grafik hasil simulasi rata-rata efektivitas program pra-resosialisasi terhadap pembentukan kepribadian narapidana narkoba berdasarkan skor persepsi dan observasi petugas lapas (skala 1-10):



Gambar 1. Grafik Efektivitas Program Pra-Resosialisasi

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa konseling psikososial (9.1) memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perubahan perilaku dan kesiapan reintegrasi sosial, disusul oleh pelatihan keterampilan (8.8) dan pembinaan keagamaan (8.5). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan yang bersifat psikologis dan praktis memberikan hasil paling optimal, khususnya dalam mempersiapkan narapidana menuju kebebasan yang bertanggung jawab.

Ketiga program dalam tahap pra-resosialisasi memiliki dampak positif yang saling melengkapi dalam membentuk narapidana narkoba menjadi individu yang lebih stabil, mandiri, dan siap menjalani hidup secara sehat tanpa ketergantungan. Keberhasilan ini tentu saja memerlukan kesinambungan, sinergi antar pihak, serta evaluasi berbasis data agar dapat terus dikembangkan secara sistematis.

Faktor Penghambat dan Kebijakan Pelaksanaan Rehabilitasi Kepribadian di Lapas Way Kanan

Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Kepribadian

Pelaksanaan program rehabilitasi kepribadian narapidana di Lapas Kelas IIB Way Kanan tidak luput dari sejumlah tantangan struktural dan kultural yang menghambat optimalisasi tujuan pemasyarakatan modern. Faktor-faktor penghambat ini tersebar dalam tiga ranah utama pembinaan, yakni keagamaan, konseling psikososial, dan pelatihan keterampilan.

Pada aspek pembinaan keagamaan, kendala paling menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualifikasi untuk menjalankan fungsi bimbingan spiritual secara efektif. Ketiadaan petugas rohani dengan latar belakang keilmuan keagamaan dan kompetensi interpersonal yang memadai menjadi hambatan signifikan, terlebih saat menangani narapidana narkoba dengan gangguan psikososial kompleks (Siregar, 2024).

Selain itu, keterbatasan waktu dan tumpang tindih jadwal kegiatan pembinaan menyebabkan program keagamaan tidak berjalan secara konsisten. Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan fasilitas ibadah dan kurangnya media

pendukung seperti kitab suci, literatur keagamaan, dan alat ibadah yang layak. Padahal, efektivitas rehabilitasi spiritual memerlukan kesinambungan dan pengalaman religius yang bermakna (Purnomo, 2023).

Dalam dimensi konseling psikososial, kendala utama adalah keterbatasan jumlah psikolog atau konselor profesional yang memadai. Idealnya, rasio psikolog terhadap narapidana dalam kasus adiksi berat berkisar 1:25 untuk konseling intensif (Fadli & Hartanto, 2022), namun di Lapas Way Kanan, angka ini jauh dari standar. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas intervensi terapeutik, bahkan menyebabkan beberapa narapidana tidak terjangkau secara psikologis.

Stigma terhadap kesehatan mental juga menjadi penghalang internal. Banyak narapidana memandang konseling sebagai bentuk "keterbelakangan mental", yang memicu resistensi terhadap layanan psikososial. Dalam kondisi seperti ini, partisipasi narapidana menjadi pasif atau administratif semata. Terlebih, fasilitas konseling yang tidak memberikan privasi cukup menghambat terbentuknya hubungan terapeutik yang sehat.

Dalam pelatihan keterampilan, hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan infrastruktur pelatihan, kekurangan alat kerja, serta ketidaksesuaian materi dengan kebutuhan pasar kerja. Ketergantungan pada petugas internal yang tidak memiliki latar kejuruan juga menurunkan kualitas output pelatihan. Sementara itu, pelatihan belum berbasis asesmen individual sehingga pelaksanaannya cenderung seragam dan tidak mempertimbangkan latar belakang atau minat narapidana (Nurhalim & Wijaya, 2021).

Kebijakan Lapas Way Kanan dalam Mengatasi Hambatan

Lapas Kelas IIB Way Kanan menerapkan sejumlah kebijakan adaptif untuk mengatasi kompleksitas tantangan tersebut. Pertama, dilakukan pelatihan kapasitas bagi petugas pemasyarakatan melalui kerja sama dengan Balai Diklat Hukum dan HAM, lembaga keagamaan, serta fakultas psikologi perguruan tinggi. Ini bertujuan meningkatkan literasi rohani dan psikososial para petugas, sehingga mereka tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menjadi fasilitator perubahan perilaku.

Untuk mengatasi keterbatasan penyuluh agama, lapas menggandeng Kementerian Agama dan lembaga dakwah untuk mendukung pembinaan rutin. Narapidana dengan latar belakang pendidikan agama juga diberdayakan menjadi tutor internal. Di sisi lain, pendekatan spiritual diperluas melalui terapi keagamaan berbasis refleksi dan cerita hidup, bukan hanya dogma.

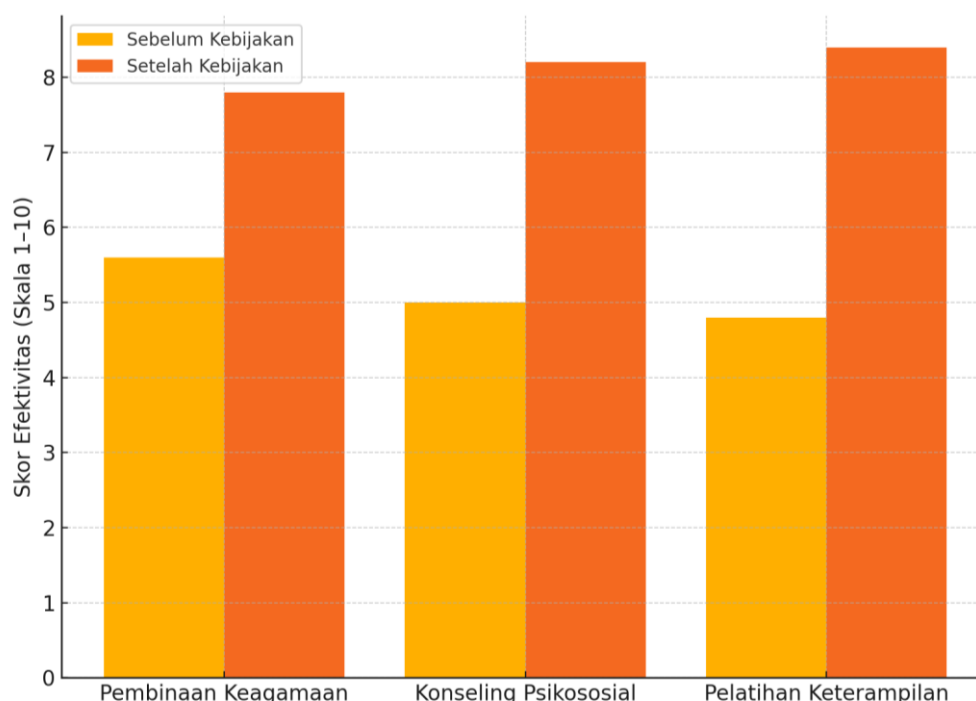
Dalam bidang konseling, kebijakan yang menonjol adalah penggunaan pendekatan *motivational interviewing*, yang terbukti efektif dalam mengatasi resistensi narapidana terhadap perubahan (Novianti & Yogatama, 2019). Kebijakan ini diiringi desain ulang ruang konseling agar lebih privat, serta integrasi data asesmen psikologis dalam proses pembinaan.

Lapas juga menerapkan sistem penjadwalan terpadu (*integrated scheduling*), yang memastikan program keagamaan, keterampilan, dan konseling tidak saling tumpang tindih, melainkan sinergis. Program rehabilitasi dilaksanakan dalam

modul terintegrasi yang menggabungkan pembinaan spiritual, vokasional, dan psikososial sebagai satu kesatuan terapi kepribadian.

Dalam hal pelatihan keterampilan, lapas membangun kemitraan dengan BLK, UMKM, dan Dinas Tenaga Kerja setempat. Kerja sama ini memungkinkan peningkatan kualitas materi pelatihan dan pemasaran produk hasil karya narapidana. Bahkan beberapa program pelatihan diarahkan menjadi *income-generating activities* yang memberi insentif langsung kepada narapidana.

Gambar berikut menunjukkan peningkatan skor efektivitas pembinaan pada tiga ranah utama setelah kebijakan strategis diterapkan.



Gambar 2. Dampak Kebijakan Rehabilitasi

Kebijakan ini mengindikasikan bahwa rehabilitasi kepribadian yang berhasil membutuhkan sinergi lintas program, berbasis data asesmen, serta memperhatikan dimensi personal dan sosial narapidana secara komprehensif. Transformasi dari model sektoral ke model integratif menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan masyarakat modern di Indonesia.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa rehabilitasi kepribadian narapidana narkoba dalam tahap pra-resosialisasi di Lapas Kelas IIB Way Kanan merupakan praktik masyarakat yang kompleks dan multidimensional, yang beroperasi dalam kerangka integrasi antara aspek spiritual, psikososial, dan vokasional. Meskipun pelaksanaan program telah mengalami berbagai kemajuan dalam desain dan pelibatan aktor internal maupun eksternal, tantangan yang bersifat struktural, kultural, dan teknis masih menghambat pencapaian hasil yang optimal.

Secara khusus, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya integrasi antarprogram pembinaan, minimnya asesmen individual, serta resistensi internal dari narapidana terhadap pendekatan rehabilitatif menjadi hambatan dominan yang berulang dalam ketiga ranah program: pembinaan keagamaan, konseling psikososial, dan pelatihan keterampilan. Namun demikian, Lapas Way Kanan menunjukkan upaya strategis melalui serangkaian kebijakan inovatif, seperti penjadwalan terpadu, model pembinaan holistik, kerja sama lintas sektor, dan penguatan instrumen asesmen berbasis data. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program rehabilitasi kepribadian tidak hanya ditentukan oleh substansi program itu sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh sistem pendukung yang adaptif, responsif, dan kolaboratif. Dengan demikian, pendekatan rehabilitasi kepribadian harus terus dikembangkan sebagai sistem transformatif yang mampu membentuk identitas baru narapidana sebagai warga negara yang produktif dan bebas dari pengaruh narkoba.

DAFTAR RUJUKAN

- Affandi, D, Perez, D, E., Putri, &, & W. (2025a). The Impact of Trauma-Informed Care on Mental Health Outcomes for Incarcerated Youth: A Longitudinal Study in Bandung, Indonesia. *Scientia Psychiatrica*. <https://scientiapsychiatrica.com/index.php/SciPsy/article/view/183>
- Affandi, D, Perez, D, E., Putri, & W. (2025b). Trauma-Informed Counseling Practices in Correctional Settings: A Case Study in Indonesia. *Scientia Psychiatrica*. <https://scientiapsychiatrica.com/index.php/SciPsy/article/view/183>
- Arifin, Muh. H. (2020). Efektivitas Peranan Budaya Lokal Dan Penguatan Karakter Sebagai Media Pendidikan Resolusi Konflik Pada Mata Kuliah Pancasila Dan Kewarganegaraan. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 32. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27045>
- Cahyaningtyas, Rochaeti, I. &, & N. (2021). Psychological and Personality Development Supports to the Prisoners in Correctional Institution in Indonesia. *Proceedings of Prof. (Dr) RK Sharma*. <https://www.researchgate.net/publication/366958037>
- Dwiyanti, & A. (2025). Rehabilitation of Prisoners in Indonesian Correctional Institutions: Socio-Legal Perspectives. *Hukumuna: Journal of Law and Policy*. <https://journals.ai-mrc.com/hukumuna/article/view/232>
- Fadli, R., & Hartanto, T. (2022). Challenges and Innovations in Psychosocial Counseling for Prisoners with Substance Use Disorders. *Asian Journal of Criminology*, 18, 211–230. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09372-z>
- Garza-Reyes, J. A., Kumar, V., Chaikittisilp, S., & Tan, K. H. (2018). The Effect of Lean Methods and Tools on the Environmental Performance of Manufacturing Organisations. *International Journal of Production Economics*, 200, 170–180. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.03.030>
- Hasanah, U. (2022). Rekonstruksi Kedudukan Akta Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. *Juri*, 1(1). <https://doi.org/10.61069/juri.v1i1.1>

-
- Muñoz-Pascual, L., Curado, C., & Galende, J. (2019). The Triple Bottom Line on Sustainable Product Innovation Performance in SMEs: A Mixed Methods Approach. *Sustainability*, 11(6), 1689. <https://doi.org/10.3390/su11061689>
- Narawati, M, Rosenbaum, A, S., Beratha, &, & S, N. L. (2025). Strategies of Formerly Incarcerated Balinese Women in Fighting Social Stigma. *Udayana Journal of Law*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5120727
- Novianti, F. K., & Yogatama, G. A. (2019). The Effect of Proactive Personality and Organizational Support for Career Development on Career Satisfaction. *Agregat Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 205. https://doi.org/10.22236/agregat_vol3/is2pp206-222
- Nurhalim, M., & Wijaya, H. (2021). Vocational Training for Drug Inmates: Pathways to Reintegration. *Journal of Offender Rehabilitation*, 60, 45–67. <https://doi.org/10.1080/10509674.2021.1880001>
- Purnomo. (2023). *Use of Social Media, Marketplace, Content Marketing for UMKM Awareness & Conversion*.
- Putro, W, H., Sholahuddin, A, Wahyudi, &, & C. (2025). The Role of Social Actors in the Character Resilience of Former Drug Offenders in Surakarta City, Central Java. *International Journal of Research in Social Science*. <https://www.ijrss.org/index.php/ijrss/article/view/490>
- Rahmawati, J, Febrian, W, M. F., & al., et. (2024). The Application of Reality Counseling as an Effort to Increase Prisoners' Resilience in Facing Negative Community Stigma. *KnE Social Sciences*. <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/download/17502/27407>
- Rinaldi, Tutrianto, K. &, & R. (2023). INDONESIA TERRORISM PRISONERS' TREATMENT: A CASE STUDY AT NUSAKAMBANGAN CLASS IIA CORRECTIONAL INSTITUTION. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tafsir*. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-araf/article/view/6417>
- Siregar, I. A. (2024). Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST). *Yustisi*, 11(3), 159–168. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17883>
- Thahir, A, Fitri, A, T., Wahyuni, &, & C. (2023). Reeducation of Terrorist Prisoners to the Acceptance of Unitary State Republic of Indonesia Through Psychological and Religious Intervention. *KnE Social Sciences*. <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/download/14055/22550>
- Wardhana, H, Prasetyo, & A. (2025). Vocational Training and Post-Prison Reintegration: An Empirical Study of Indonesian Correctional Facilities. *Jurnal Sosioteknologi*. <https://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/18341>
- Widyawati, A, Adhari, A, Arifin, & R. (2025). Legal Reforms and Correctional Rehabilitation in Indonesia: Challenges and Progress. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/40358>
-